



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Revisi Roadmap RB Nasional 2020–2024 (Permen PANRB No 3 Tahun 2023)

Kamaruddin

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Kedeputan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan – 2023

bangga
melayani
bangsa

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

2024
DYNAMIC GOVERNANCE
Birokrasi semakin efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.

03



VISI

Terwujudnya Pemerintahan Berkelas Dunia

Pada akhir periode Grand Design, yaitu Tahun 2025 adalah diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan: tidak ada korupsi; APBN/APBD efektif efisien baik; semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; komunikasi dengan publik baik; hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolapsan kerja, dan pengurangan kemiskinan)

2014
RULE BASED BUREAUCRACY
Birokrasi cenderung kaku dan berorientasi pada aturan.

01

2019

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

Birokrasi berorientasi hasil, manajemen kinerja diterapkan, dan didukung SPBE.

02

Sumber: Perpres 81 Tahun 2010

KEKURANGAN & KRITIKAN ATAS CAPAIAN RB

01

RB DIPANDANG BELUM BERDAMPAK

Capaian RB selama ini dipandang **belum memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian pembangunan.**

02

TERTINGGAL JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN

Dilihat dari berbagai indikator tata Kelola Pemerintahan, baik secara nasional dan global, kualitas tatakelola pemerintahan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun **namun jika diperbandingkan dengan negara-negara lain terutama di ASEAN atau di ASIA, capaian tersebut masih jauh tertinggal.**

03

MASIH MENGUKUR PROSES/ADMINI- STRATIF

Penilaian kemajuan RB selama ini **dianggap lebih banyak mengukur proses bukan pada hasil/dampak**

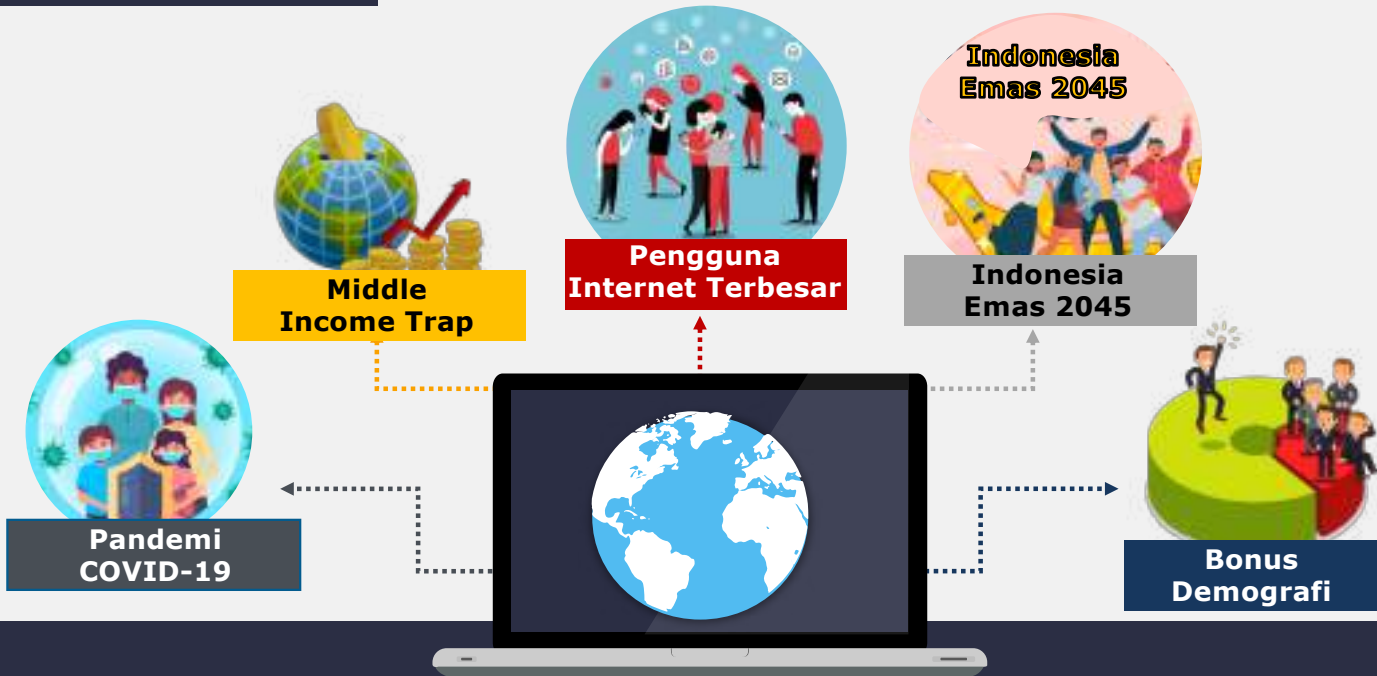
04

PELAKSANAANNYA TIDAK KOLABORATIF

RB dipandang **hanya sebatas proyek** dan dikerjakan oleh Kementerian/unit tertentu.



EKSTERNAL



1. Mendukung capaian target pembangunan nasional

INTERNAL

RB Telah berhasil memperbaiki tatakelola dalam berbagai aspek Namun, upaya tersebut dianggap belum memberikan manfaat nyata:

2. Memberikan dampak kepada masyarakat.



URGENSI PENAJAMAN ROADMAP RB 2020-2024



PERLUNYA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

PROBLEM HULU (eksiting)

1. Kebijakan tata kelola pemerintahan pada level pusat (antar K/L) masih terkesan *silo (fragmented)* dan tumpang tindih, sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi Pemda
2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit
3. Inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran
4. Budaya birokrasi: berAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik
5. Kualitas SDM ASN yang belum merata
6. Birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Contoh: transformasi digital)
7. RB hanya bersifat proyek dan pemenuhan administrasi
8. Komitmen pimpinan daerah terhadap RB yang rendah. (Contoh: belum ada *reward and punishment*)

PROBLEM HILIR (Perlu diperhatikan)

1. Pelayanan publik
 - a. Dasar (pendidikan, kesehatan, akses pada air bersih)
 - b. Administratif (KTP, KK, SIM, Akte)
 - c. Perijinan
 - d. Sosial (bantuan sosial)
2. *Stunting*
3. Kemiskinan
4. Lapangan kerja
5. Perizinan
6. Inflasi

Road Map RB 2020-2024 (Permenpanrb 25/2020)

Road Map RB 2020-2024 Penajaman (Permenpanrb 3/2023)

Tujuan: Pemerintah yang baik dan bersih

Sasaran: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel dan pelayanan public prima.

(3 sasaran dan 8 area perubahan)

Goal Setting

Tujuan: Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik

Sasaran RB General: 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, dan 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional

Sasaran RB Tematik: Penekanan pada penyelesaian Isu Tematik

Kegiatan utama ditetapkan berdasarkan pada penjabaran dari **8 area perubahan**

Kegiatan yang Fokus dan Berdampak

Kegiatan utama ditetapkan dengan melihat **tingkat efektivitas kegiatan** yang dapat memberikan **kontribusi paling besar** terhadap pencapaian sasaran, berfokus pada implementasi kebijakan

Penekanan pada **pelaksanaan 8 area perubahan** di Instansi Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tata kelola birokrasi (**Isu Hulu**)

Fokus Pelaksanaan

RB General: Berfokus pada **perbaikan sistem dan manajemen internal IP** guna menyelesaikan permasalahan tata Kelola birokrasi ("**Isu Hulu**")
RB Tematik: Berfokus pada **isu-isu prioritas presiden** yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat ("**Isu Hilir**")

Indikator-indikator yang dipakai "terkesan" **mengumpulkan/mengkompilasi indikator** yang terkait dengan urusan RB. Indikator Penilaian RB terdiri atas: (157 pertanyaan pemenuhan, 22 indikator hasil antara, 102 pertanyaan Reform)

Penajaman Indikator RB

Mempertajam, Menyederhanakan, Menynergikan, dan Mengintegrasikan Indikator dengan memilih indicator-indicator yang paling **relevan** serta memiliki keandalan untuk mengukur kemajuan RB. Indikator Penilaian RB terdiri atas (4 strategi dan 27 indikator hasil)

Penyempurnaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

TUJUAN RB 2020-2024

BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF
DAN BERDAYA SAING MENDORONG
PEMBANGUNAN NASIONAL

INDIKATOR OUTCOME

- Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
- CPI (Corruption Perception Index)
- EGDI (E-Government Development Index)
- GEI (Government Effectiveness Index)

INDIKATOR IMPACT

Capaian Indikator Kinerja
Pemerintah:

- Tingkat kemiskinan Nasional
- Tingkat realisasi investasi Nasional
- Tingkat Inflasi nasional
- Tingkat Penggunaan PDN



SASARAN RB 2020-2024

RB GENERAL

Terciptanya tata kelola
pemerintahan digital yang
lincah, kolaboratif dan
akuntabel

- Indeks SPBE
- Capaian Akuntabilitas Kinerja
- Capaian Akuntabilitas Keuangan

Terciptanya Budaya
Birokrasi BerAKHLAK
dengan ASN yang
Profesional

- Survei Penilaian Integritas
- *Employer Branding*
- Indeks BerAKHLAK
- Survei Kepuasan Masyarakat

RB TEMATIK

RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan **kemiskinan**, peningkatan **Investasi**, akselerasi **digitalisasi administrasi pemerintahan**, **RB Tematik Prioritas Presiden**.



LAMA

TUJUAN RB: "PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH"

Indikator Outcome:

- Indeks RB

Indikator Impact:

- *Ease of Doing Business*
- *Government Perception Index*
- *Corruption Perception Index*
- *Trust Barometer*

3 SASARAN RB

Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel:

- IPAK
- Nilai SAKIP
- Opini BPK

Birokrasi yang Kapabel:

- Indeks Kelembagaan
- Indeks SPBE
- Indeks Profesionalitas ASN

Pelayanan Publik yang Prima:

- Indeks Pelayanan Publik

8 AREA PERUBAHAN

SASARAN PROGRAM & KEGIATAN MESO

Sasaran RB 1: 5 Sasaran Program
▽
Kegiatan Meso

Sasaran RB 2: 4 Sasaran Program
▽
Kegiatan Meso

Sasaran RB 3: 2 Sasaran Program
▽
Kegiatan Meso

PROGRAM & KEGIATAN MIKRO

Area 1
Program
▽
Kegiatan

Area 2
Program
▽
Kegiatan

Area 3
Program
▽
Kegiatan

Area 4
Program
▽
Kegiatan

Area 5
Program
▽
Kegiatan

Area 6
Program
▽
Kegiatan

Area 7
Program
▽
Kegiatan

Area 8
Program
▽
Kegiatan

BARU

TUJUAN RB: "BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN BERDAYA SAING MENDORONG PEMBANGUNAN NASIONAL dan PELAYANAN PUBLIK"

INDIKATOR OUTCOME

- Indeks Reformasi Birokrasi
- *Corruption Perception Index*
- *E-Government Development Index*
- *Government Effectiveness Index*

INDIKATOR IMPACT

- *Penurunan Angka Kemiskinan*
- *Peningkatan Realisasi Investasi*
- *Pengendalian Tingkat Inflasi*
- *Penggunaan Produk Dalam Negeri*

SASARAN RB GENERAL

Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, Dan Kolaboratif

- Indeks SPBE
- Capaian Akuntabilitas Kinerja
- Capaian Akuntabilitas Keuangan

Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

- Nilai Survei Penilaian Integritas
- Nilai Employer Branding
- Indeks BerAKHLAK
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

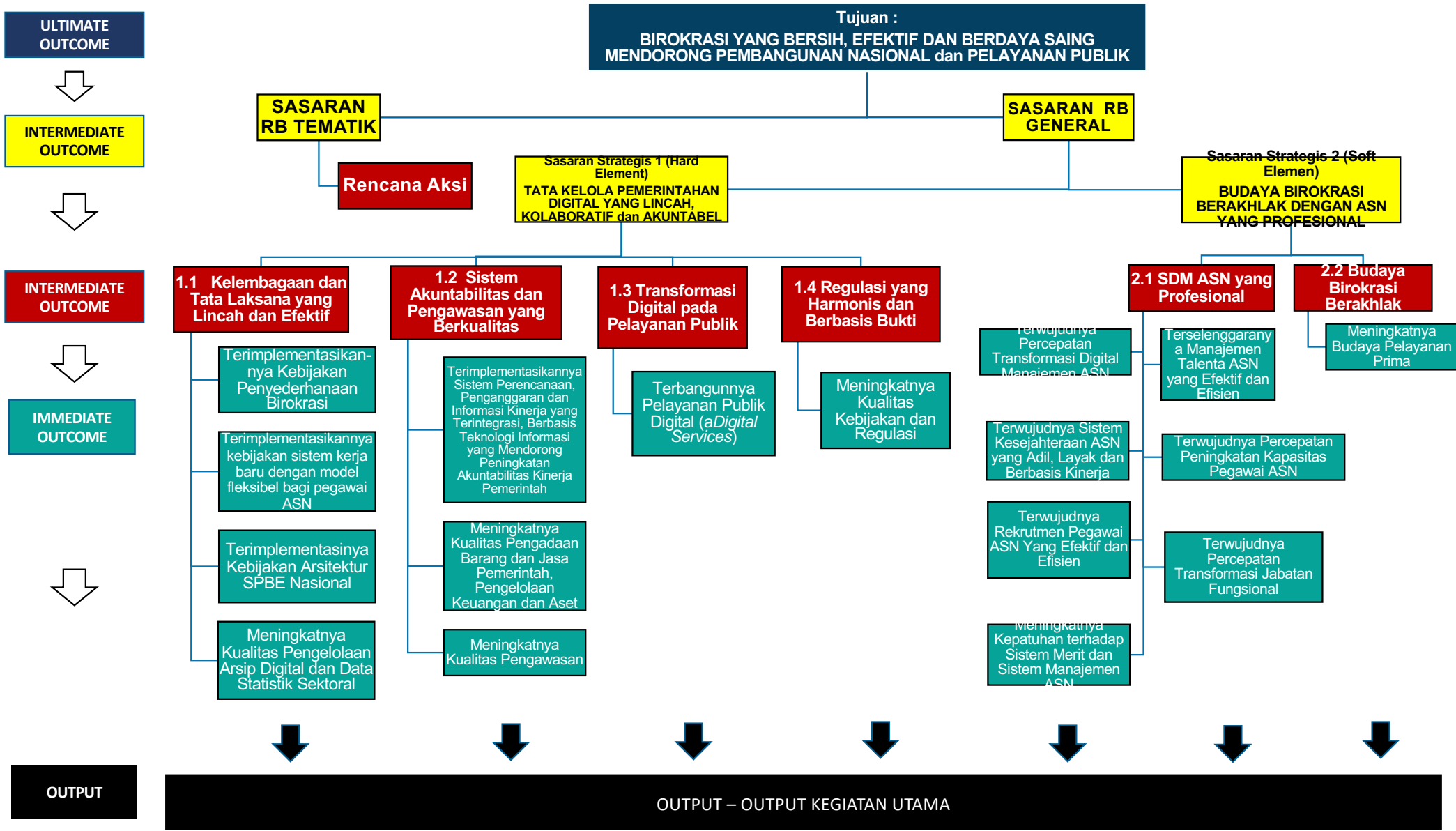
SASARAN RB TEMATIK

Nasional (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Pada 4 Tema Prioritas RB Tematik)

Instansional (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Penanganan Tema yang Dipilih)

KEGIATAN UTAMA

RENCANA AKSI TEMATIK



REFORMASI BIROKRASI HARUS DAPAT DIRASAKAN HASILNYA OLEH MASYARAKAT

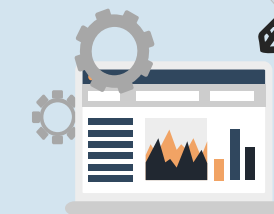


dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran

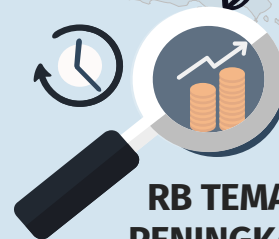


REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

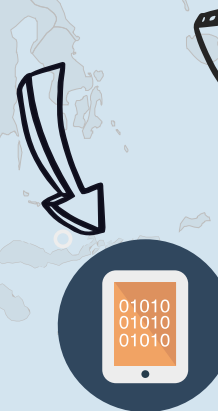
Menyelesaikan permasalahan nyata di tengah masyarakat



RB TEMATIK
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN



RB TEMATIK
PENINGKATAN
INVESTASI



RB TEMATIK
DIGITALISASI
ADMINISTRASI
Pemerintahan



RB TEMATIK
PRIORITAS
PRESIDEN



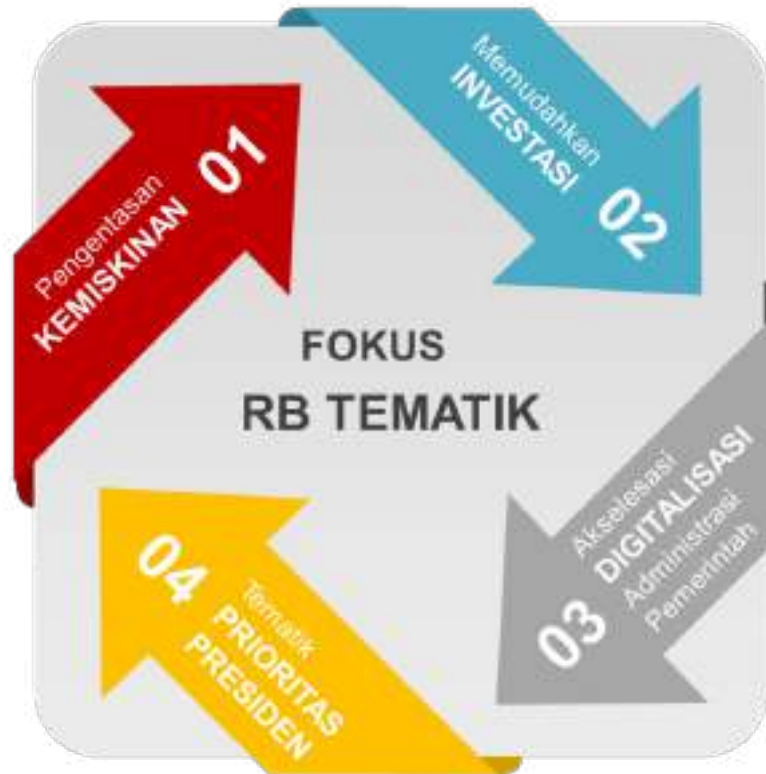
RB TEMATIK

RB Tematik Pengentasan Kemiskinan

Fokus Presiden untuk segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan target turunnya angka kemiskinan menjadi 7% dan daerah dengan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2024, maka **seluruh elemen birokrasi wajib berkolaborasi dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut.**

RB TEMATIK PRIORITAS PRESIDEN

Tematik Prioritas Presiden. Isinya merespon hal-hal yang mendesak (urgen) karena resiko persoalannya akan muncul segera dan dampaknya juga serius pada masyarakat. Hal tersebut perlu dikawal oleh seluruh level pemerintah. (Inflasi & Penggunaan PDN)



RB Tematik Peningkatan Investasi

Presiden selalu menyampaikan bahwa investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Investasi yang meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. **RB perlu mengintervensi dengan menyederhanakan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor.**

RB TEMATIK DIGITALISASI Administrasi Pemerintahan

Presiden selalu berpesan agar "Pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat karena di era persaingan antar negara, yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi." Pemerintah harus bersiap menghadapi disrupsi teknologi dan iklim digital yang dicirikan dalam era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity).. **Pemerintah harus berbenah dan membangun birokrasi digital dengan fokus perbaikan pada digitalisasi struktur, culture maupun kompetensi.**

RB TEMATIK

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional.

PELAKSANA RB TEMATIK

Leading Sector

kementerian/lembaga yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB Tematik

Implementing agency

Instansi Pemerintah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mendapatkan mandat atau tanggung jawab untuk melaksanakan program/kegiatan terkait tema

Non implementing agency

Instansi Pemerintah selain implementing agency dan leading sector yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro

MEKANISME KERJA RB TEMATIK

MEMBANGUN LOGICAL FRAMEWORK

Membangun *logical framework* yang dianggap paling ideal atau mampu mempercepat dampak atas tema yang dipilih.

IDENTIFIKASI DEBOTTLENECKING

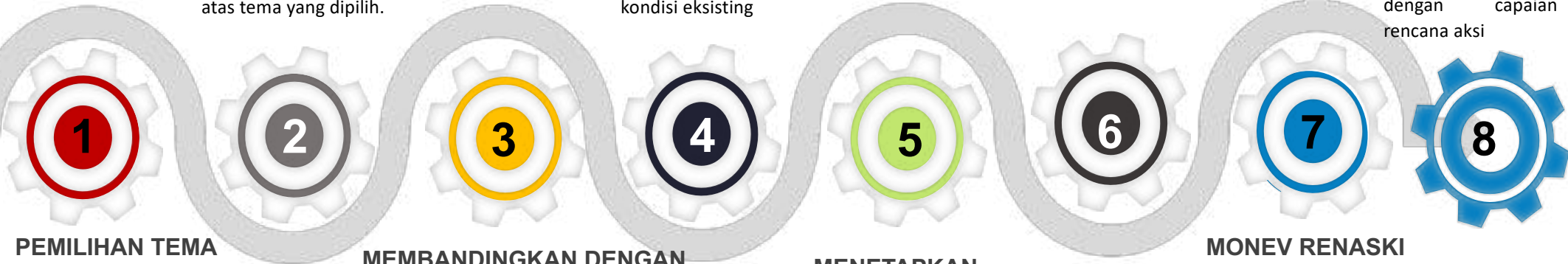
Mengidentifikasi hal-hal yang berdasarkan kondisi ideal (*logical framework*) belum dilakukan pada kondisi eksisting

MELAKSANAKAN RENAksi

Pelaksanaan rencana aksi bersama RB Tematik

MENGUKUR HASIL/DAMPAK

Mengukur Outcomes/Impact dan menganalisis keterkaitannya dengan capaian rencana aksi



PEMILIHAN TEMA

Memilih tema yang akan ditetapkan sebagai RB Tematik

MEMBANDINGKAN DENGAN KONDISI EKSISTING

Membandingkan kesesuaian kondisi eksisting dengan kondisi ideal (*Logical framework*) yang telah ditetapkan sebelumnya.

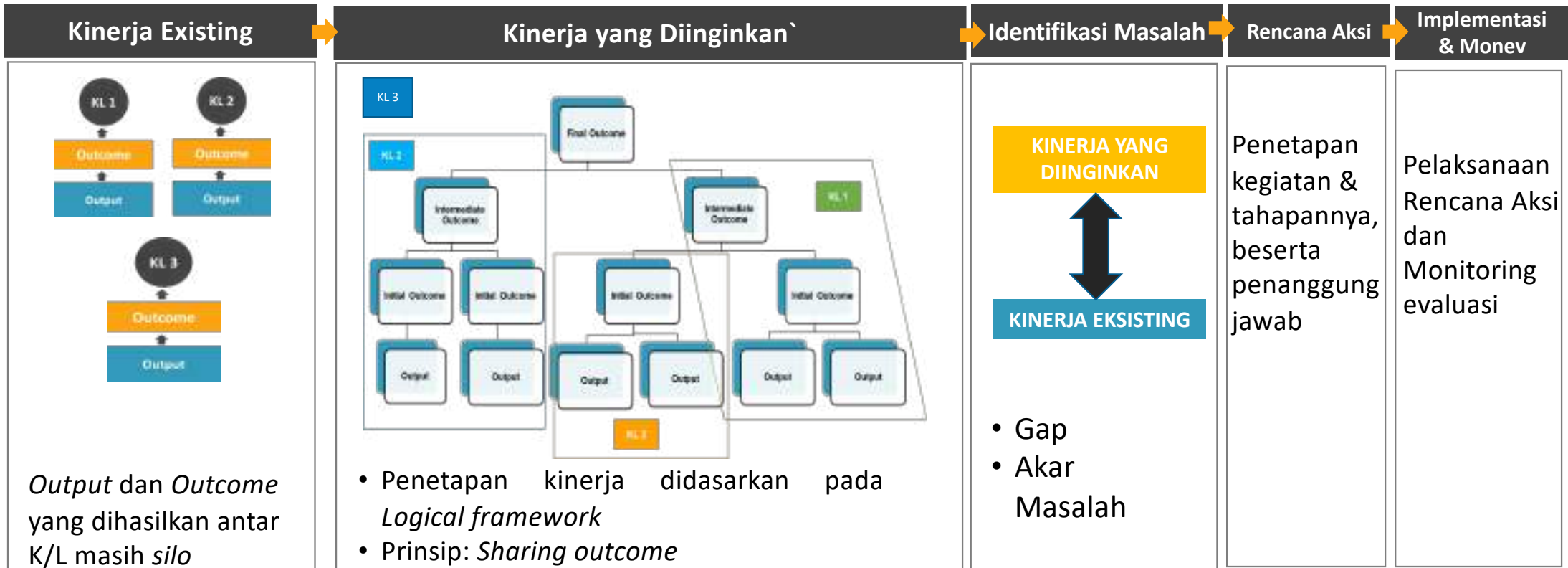
MENETAPKAN RENAksi

Menetapkan rencana aksi untuk mengurai masalah/*bottleneck*

MONEV RENAKSI

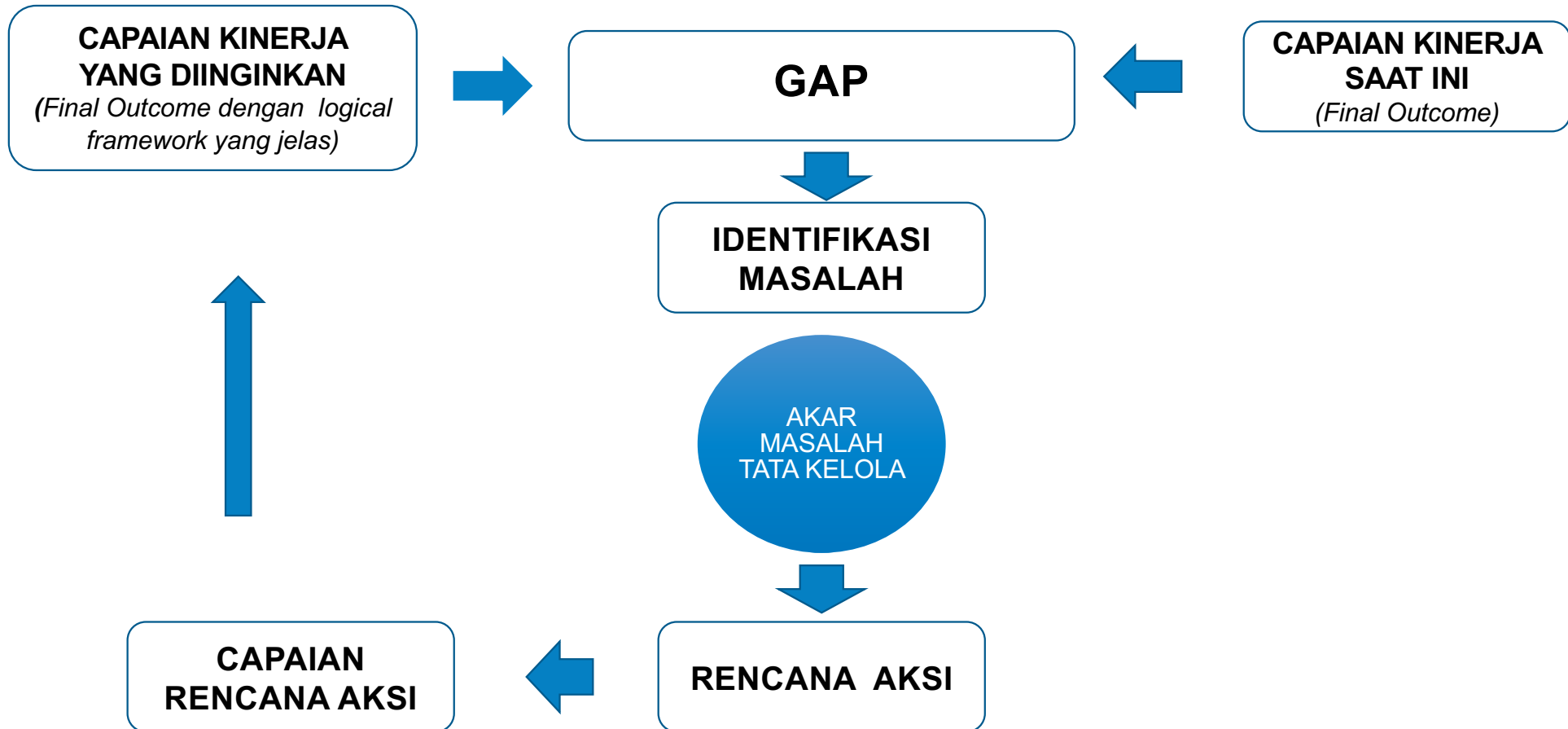
Melaksanakan *Monitoring* dan evaluasi atas capaian dari setiap renaksi.

KERANGKA LOGIS RB TEMATIK



Debottlenecking Birokrasi: Akuntabilitas Kinerja

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN & PERBAIKAN TATAKELOLA PROGRAM RB TEMATIK



Tindak Lanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

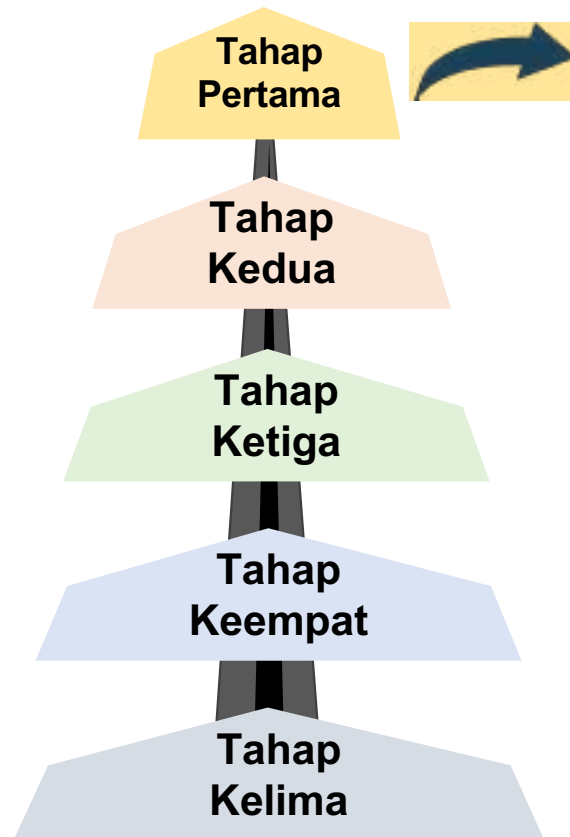
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 98 / RB.00 / 2023
Hal : Tindak Lanjut Instansi Pemerintah
atas Perubahan *Road Map*
Reformasi Birokrasi 2020-2024

28 Maret 2023

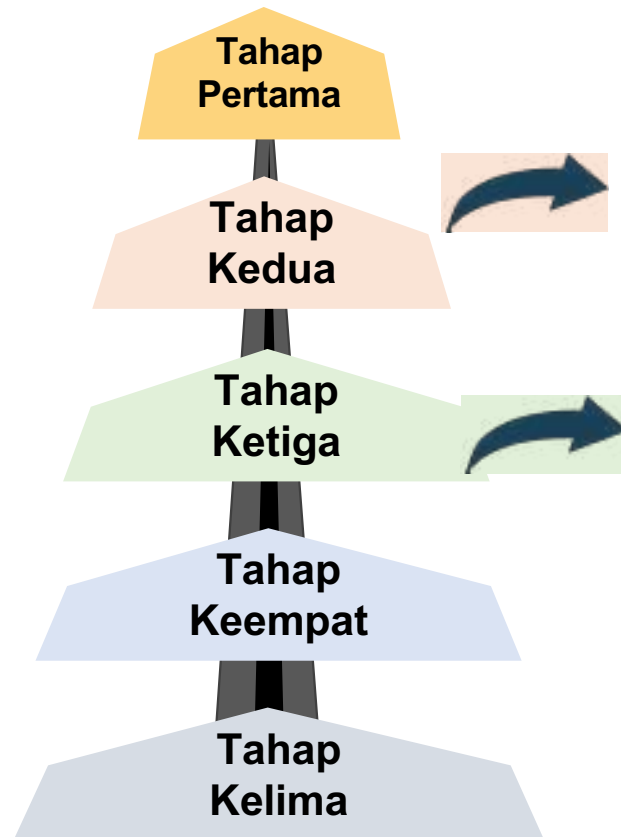


Tindak Lanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024



- Bagi K/L/D yang telah memiliki *Road Map* RB instansi, perlu menyesuaikannya dengan perubahan *Road Map* RB 2020-2024 Nasional;
- Bagi K/L/D yang belum memiliki *Road Map* RB instansi, perlu menyusun *Road Map* RB instansi sesuai dengan perubahan *Road Map* RB 2020-2024 Nasional;
- Hal-hal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB K/L/D yaitu: (1) Isu strategis dan capaian RB maupun capaian pembangunan instansional (mikro); (2) Tujuan dan sasaran strategis RB instansional (mikro); (3) Kegiatan utama RB General termasuk target tahunannya; (4) Tema RB Tematik termasuk targetnya; serta (5) Manajemen/pengelolaan RB instansional (mikro);
- Setiap K/L/D perlu menyelaraskan *Road Map* RB dengan Rencana Strategis (Renstra) bagi K/L atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi Pemerintah Daerah, dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* RB mendapatkan alokasi anggaran.
- Bagi Pemerintah Daerah dengan periode RPJMD berakhir di tahun 2023, tidak diwajibkan melakukan penyesuaian *Road Map* RB instansi, namun tetap menyusun rencana aksi berdasarkan perubahan *Road Map* RB 2020-2024 Nasional dan menjamin seluruh Kegiatan Utama dilaksanakan sampai tahun 2024.

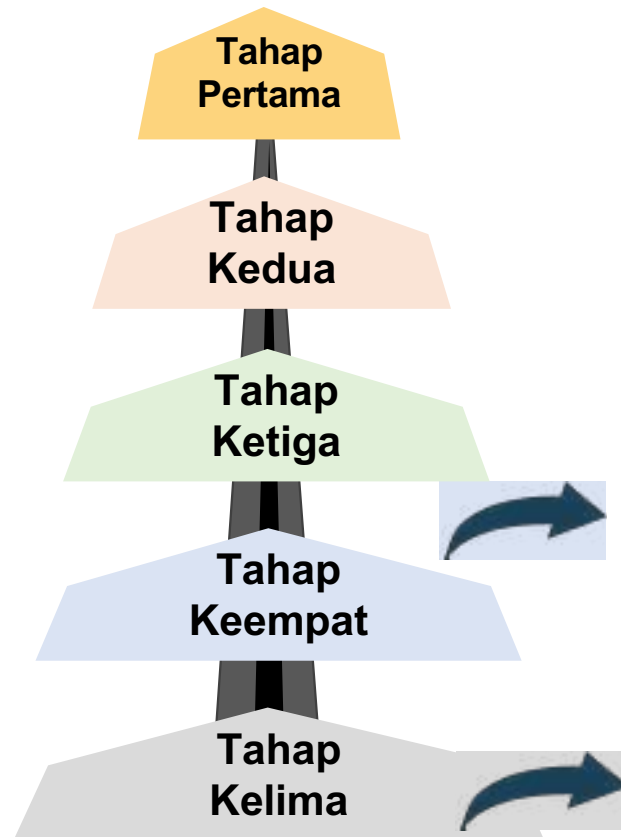
Tindak Lanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024



- Menyusun rencana aksi untuk mendetailkan Kegiatan Utama yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi, baik untuk RB General maupun RB Tematik;
- Rencana aksi minimal berisi rincian kegiatan, indikator *output*, target, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.

Dalam rangka untuk memastikan implementasi RB, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L/D dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU perlu memastikan pelaksanaan rencana aksi melalui *monitoring* secara berkala.

Tindak Lanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024



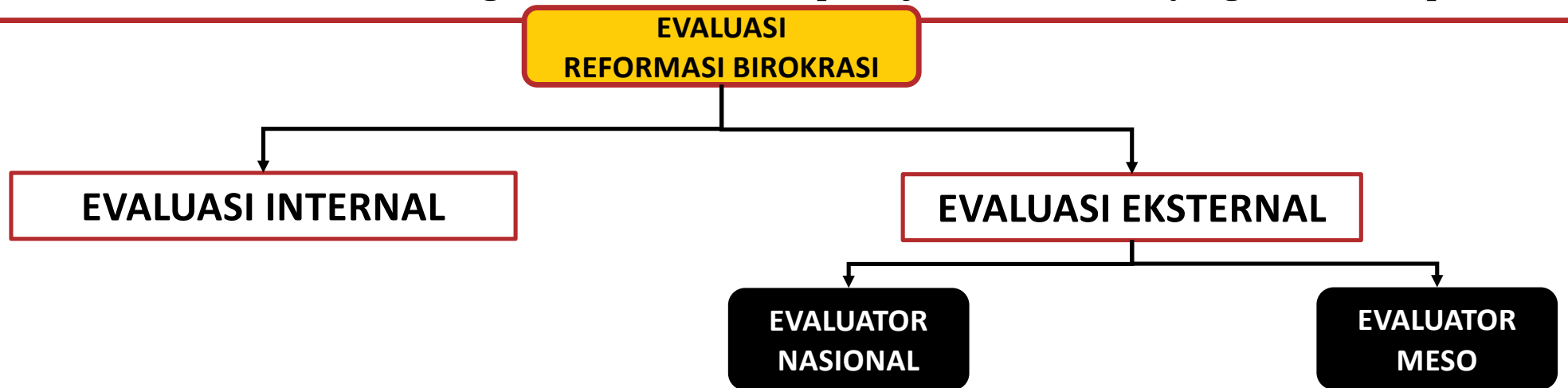
Evaluator Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) perlu memastikan *Road Map* RB instansional (mikro) dan rencana aksi RB K/L/D memiliki kualitas yang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan RB. Evaluator internal juga melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan untuk:

- Mengukur ketercapaian rencana aksi RB;
- Memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan RB kepada STU; dan
- Menyampaikan ringkasan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

STU menindaklanjuti rekomendasi dari Evaluator Internal untuk perbaikan berkelanjutan.

Gambaran Umum Evaluasi Reformasi Birokrasi

“Evaluasi reformasi birokrasi diperlukan untuk memastikan upaya reformasi birokrasi didesain secara tepat serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”



Evaluasi dilakukan oleh **evaluator internal** RB K/L/Pemda untuk memastikan perencanaan & pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pemerintahan pada masing-masing K/L/Pemda*

Evaluasi yang dilakukan oleh **evaluator nasional & meso** untuk mendapatkan gambaran kemajuan, hasil & dampak pelaksanaan RB termasuk mendapatkan rekomendasi & saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi RB di setiap K/L/Pemda*

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

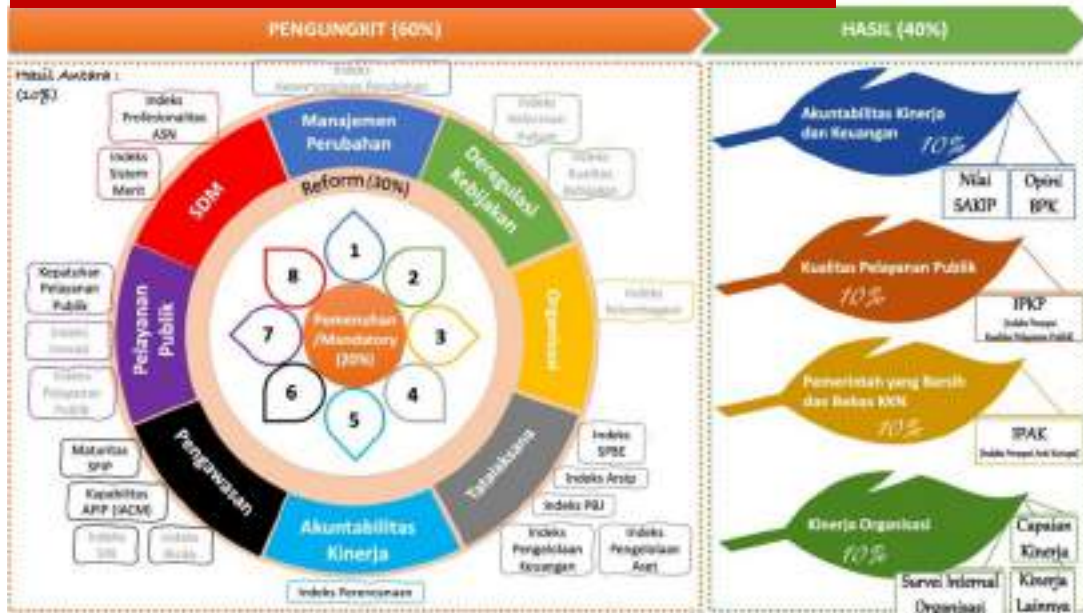


Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah



PERBANDINGAN KERANGKA EVALUASI

KERANGKA EVALUASI PERMENPAN 26 TAHUN 2020



KOMPONEN PERTANYAAN

157

PEMENUHAN

102

REFORM

KERANGKA EVALUASI REFORMASI BIRORKASI BERDAMPAK

RB GENERAL

CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN RB-GENERAL



RB TEMATIK



INDIKATOR PENILAIAN

4

STRATEGI

27

HASIL

Pengukuran RB Tematik pada K/L

Implementing Agency

(K/L yang mengampu program & kegiatan terkait tema berdasarkan perencanaan pembangunan)



Diukur dengan perhitungan capaian indikator program & kegiatan yang terkait dengan tema

Pemetaan dan ketersediaan data oleh Kementerian PPN/BAPPENAS)

Non-Implementing Agency

(K/L yang tidak terlibat dalam program & kegiatan terkait tema berdasarkan perencanaan pembangunan)

Diukur dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap tema berdasarkan:

Dukungan kebijakan

Dukungan anggaran

Instruksi harian

Support lapangan

Pengukuran RB Tematik pada Pemerintah Daerah



Strategi pembangunan RB tematik



Capaian Dampak



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa

TERIMA KASIH

